

Ikut Jadikan NKRI Utuh KGPAA Paku Alam VIII Pahlawan Nasional

JAKARTA (KR) - Pemerintah akan memberikan gelar pahlawan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam VIII atas jasa almarhum yang begitu besar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguasa Pura Pakualaman 1937-1989 menerima anugerah tersebut bersama lima tokoh lainnya.

"Bapak Presiden sudah berdiskusi dengan kami, dengan Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan, memutuskan tahun ini memberikan lima (gelar pahlawan nasional) kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan negara Republik Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan-pembangunan sehingga kita eksis sampai sekarang sebagai negara yang berdaulat," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD selaku Ketua



KR-istimewa

KGPAA Paku Alam VIII

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Mahfud MD usai diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (3/11).

Dalam kesempatan itu Mahfud menerangkan sejumlah jasa Paku Alam VI-II. Di antaranya bersama Sultan Hamengku Buwono IX, Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh hingga saat ini.

"Sehari sesudah (kemerdekaan) itu beliau menyatakan bergabung ke Negablik Indonesia dan kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari Republik ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946," tutur Menko Polhukam.

Empat tokoh lain yang akan menerima gelar pahlawan nasional, yakni Dr dr HR Soeharto dari Jawa Tengah yang dinilai telah berjuang bersama Presiden Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan, almarhum ikut serta dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Air.

"Ikut pembangunan department store syariah dan pembangunan Monumen Nasional serta Masjid Istiqlal dan pembangunan

*** Bersambung hal 7 kol 5**

Diperas, Pelaku Usaha Harus Berani Laporkan KPK

YOGYA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kasus korupsi di Indonesia dari 2004 sampai September 2022 sebanyak 1.444 kasus, 363 di antaranya melibatkan pelaku usaha. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlanjut-larut. Sebaliknya, harus ditangani serius. Untuk itu diperlukan peningkatan integritas melawan korupsi melalui keberanian Lihat, Lawan, Laporkan (3L).

"Korupsi memang sangat sistemik, masif, terstruktur dan berskala luas, sehingga dianggap kejahatan luar biasa. Karena itu korupsi disejajarkan dengan terorisme yang menuntut penanganan dan pencegahan yang luar biasa pula.

Bertolak dari kenyataan itu, seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan bahaya laten korupsi dan pencegahannya," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi di Gedhong Pracimasana, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (3/11).

Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Pol Kumbul Kuswidjanto Sudjadi.

Sultan berharap program antikorupsi dunia usaha kolaborasi KPK dengan

*** Bersambung hal 7 kol 1**

KONDISI GLOBAL TAK PASTI Ekonomi 2023 Optimis, Namun Tetap Waspada



KR-Fira Nuriani

Y Sri Susilo, Budiharto Setyawan, Eko Suwardi, Parjiman, Wawan Harmawan

YOGYA (KR) - Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2023 optimis namun tetap waspada. Hal itu seiring tantangan ekonomi yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, terutama kendala dari sisi supply akibat dampak pandemi Covid-19 maupun kondisi global dan geopolitik.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Budiharto Setyawan mengatakan, seperti dikemukakan Menteri

Keuangan dan Gubernur BI, perekonomian tahun depan optimis namun tetap waspada. Ekonomi Indonesia bersifat terbuka sehingga tidak lepas dari kondisi global serta dampak geopolitik.

"Jangan terlalu ditakuti-takuti karena akan membentuk ekspektasi, ini yang tidak kita inginkan. Jadi di DIY dari berbagai diskusi yang kita lakukan, semua ekspektasi ekonominya masih

*** Bersambung hal 7 kol 1**

KASUS PERINTANGAN PENYIDIKAN BRIGADIR J Jaksa Minta Majelis Hakim Tolak Keberatan Chuck

JAKARTA (KR) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk menolak nota keberatan (eksepsi) yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa Chuck Putranto dalam kasus dugaan perintangan penyidikan (*obstruction of justice*) pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J).

"Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan menolak seluruh dalil keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa Chuck Putranto," kata tim JPU di PN Jakarta Selatan, Kamis (3/11).

Selain itu, JPU menimbang, materi dalam nota keberatan yang disampaikan terdakwa Chuck Putranto melalui kuasa hukumnya sudah memasuki pokok perkara, maka sudah sepatutnya dike-

sampingkan.

JPU juga meminta majelis hakim menerima surat dakwaan penuntut umum karena telah memenuhi unsur formil dan materiil. Selanjutnya, menyatakan pemeriksaan terdakwa Chuck Putranto tetap dilanjutkan dan tetap berada dalam tahanan.

Sebelumnya, pada sidang yang digelar Kamis (26/10), penasihat hukum Chuck Putranto, Jhony M W Manurung dalam nota keberatannya meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, oleh karena itu surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima.

Selain itu, tim kuasa hukum juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan terdakwa segera dilepaskan dan

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Analisis KR
Talenta Digital
Prof Dr Rahma Sugihartati

SUNGGUH SUNGGUH Terjadi

● Jarak asrama dan masjid di pondok kami kurang lebih 500 meter. Pukul 03.45 Para santri berangkat salat Subuh dengan kondisi setengah sadar. Adik kelas yang berjalan 4 meter di depan ku dengan kondisi setengah sadar tiba-tiba hilang. Setelah saya hampir ternyata dia terperosok ke dalam parit. Seketika rasa kantuk berganti gelak tawa. (Muhammad Rafi Hanan, Kelas XII IPS SMA IT Baitussalam, Prambanan, 55572)-f

JADWAL SALAT	Zuhur	Asar	Magrib	Isya	Subuh
	11:26	14:41	17:37	18:49	03:51

Jumat, 4 November 2022 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

Lindungi Buah Hati Dari Bahaya Penyakit
Tersedia Layanan Imunisasi Anak di RS Happy Land
Pendaftaran ☎ 08118550060

MELAHIRKAN NYAMAN dengan ERACS
Pendaftaran ☎ 08123 638 678

DATA KASUS COVID-19
Kamis, 3 November 2022

1. Nasional:
- Pasien positif : 6.507.610 (+4.951)
- Pasien sembuh : 6.316.793 (+2.882)
- Pasien meninggal : 158.737 (+42)

2. DIY:
- Pasien positif : 226.454 (+104)
- Pasien sembuh : 219.272 (+9)
- Pasien meninggal : 5.975 (+4)

Sumber: Satgas/Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nasional/Pemda DIY (KR-Ria/Ira)

Pakai masker untuk kesehatan bersama

KULIAH LAPANGAN DPP FISIPOL UGM DI WUKIRSARI Kanjeng Yudanegara Kolaborasikan Peran Kampus dalam Reformasi Kalurahan



KR - Istimewa

Kanjeng Yudanegara saat berdialog dengan peserta kuliah lapangan DPP Fisipol UGM

SLEMAN (KR) - Biro Tapem Setda DIY turut menghadiri pembukaan kuliah lapangan yang dilaksanakan Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan, Sleman (3/11). Kuliah lapangan ini bertujuan melatih mahasiswa memetakan potensi dan kebutuhan pemerintah kalurahan dan warga masyarakat dan dituangkan dalam bentuk kajian.

Menurut Devy Dhian Cahyati, dosen DPP Fisipol UGM, terdapat 40 mahasiswa pada mata kuliah Politik dan Pemerintahan Desa yang selama tiga minggu akan mengikuti kuliah lapangan di Kalurahan Wukirsari.

Terdapat enam tema yang hendak dikerjakan oleh peserta kuliah lapangan, seperti penelaahan pola perekonomian masyarakat, partisipasi warga dalam musyawarah pembangunan, relasi antar aktor dalam pengelolaan pertanian, peran aktor informal dalam pengambilan keputusan pembangunan kalurahan, pengelolaan Sumber Daya Air, serta strategi pengembangan potensi ekonomi pariwisata

kalurahan.

"Outputnya berbentuk policy brief, naskah kajian, dan proposal pemberdayaan masyarakat. Hal ini supaya masyarakat dan pemerintahan kalurahan dapat mendesain konsep pemberdayaan masyarakatnya serta menuangkannya dalam bentuk rencana kerja," kata Devy.

Kanjeng Yudanegara mengapresiasi kuliah lapangan mahasiswa DPP Fisipol UGM, karena dapat membantu pengembangan potensi pemerintah kalurahan dan masyarakatnya. Menurutnya, visi-misi Gubernur DIY tentang Reformasi Kalurahan secara utuh menyangkut reformasi pada sisi birokrasi pemerintahan kalurahan, dalam hal ini Lurah dan pamongnya, serta reformasi pemberdayaan masyarakat dengan lembaga kemasyarakatan kalurahan sebagai penggerakannya.

"Kuliah lapangan ini merupakan implementasi sinergi 4K, yakni Kampus, Kampung atau Kalurahan -- representasi masyarakat, Kaprajan atau Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot serta Kraton. Kampus bisa turut melakukan

pelatihan dan pendampingan terkait praktik baik birokrasi pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat sesuai ilmu yang dipelajari," tambah Kanjeng Yudanegara saat berdialog dengan peserta kuliah lapangan DPP Fisipol UGM.

Selain UGM, Kanjeng Yudanegara juga telah merangkul UII, STPMD APMD dan UTY untuk ikut bersinergi dalam mereformasi kalurahan. Harapannya, kampus memperbanyak kegiatan seperti KKN, kuliah lapangan atau program Merdeka Belajar di kalurahan.

Menurut Kanjeng Yudanegara, interaksi kampus dengan kalurahan positif untuk meningkatkan ketrampilan SDM masyarakat, kaitannya nanti dengan tujuan peningkatan kualitas "hidup-kehidupan-penghidupan" masyarakat dalam Pancasila.

Lurah Wukirsari, Handung Tri Rahmawan, menyambut baik kuliah lapangan dari DPP Fisipol UGM. "Hasil kuliah lapangan tersebut akan menjadi masukan dalam perencanaan kalurahan sesuai kebutuhan dan potensi wilayah Wukirsari," ujarnya. (Sal)